



Kisruh APBD 2015 Ahok Incar Empat Anggota Dewan

JAKARTA — Sehari menjelang pelaksanaan sidang paripurna hak angket, situasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, riuh. Spanduk dukungan penggunaan hak angket sudah dibentangkan di depan gedung itu.

Isinya penuh tanda tangan warga yang meminta Dewan mencabut mandat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Ini aspirasi warga yang sudah muak dengan kepemimpinan Ahok," kata Laode Kamaludin, koordinator kelompok massa Masyarakat Jakarta Cabut Mandat Gubernur DKI Jakarta, di depan gedung Dewan kemarin.

Hingga kemarin, berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, 102 dari 108 legislator DKI sudah menandatangani penggunaan hak angket terhadap Ahok. Ketua Fraksi Hanura Mohamad Sangaji memberi konfirmasi soal kabar tersebut. "Ya, kira-kira seperti itulah kondisinya," kata dia yang ikut menandatangani spanduk tersebut.

Dari Medan Merdeka Selatan, Gubernur Basuki tidak tinggal diam. Dia menyiapkan serangan balasan bagi politikus Kebon Sirih dengan mengincar empat anggota Dewan untuk dilaporkan ke aparat hukum. Laporan itu bertujuan memperjelas dukung perkara penggunaan hak angket terhadap dirinya oleh Dewan. "Kami lihat dulu jalannya hak angket ini," kata dia di Balai Kota kemarin.

Ahok akan meminta aparat hukum menelusuri temuan adanya anggaran siluman di balik penggunaan hak angket. Mantan Bupati Belitung Timur itu menuding anggota Dewan membuat anggaran versi mereka sendiri tanpa melalui sistem anggaran elektronik (*e-budgeting*). Dalam anggaran itu terdapat banyak program unggulan yang dipotong dan dialihkan menjadi proyek fiktif. Karena itu,

dia menuding anggaran itu dibuat setelah rapat paripurna digelar. "Mereka nekat bikin sendiri."

Laporan, kata Ahok, bakal diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI atau Kejaksaan Agung. Namun dia enggan menyebut empat nama anggota Dewan yang diincarnya. Dia memastikan tak akan menggunakan pasal pencemaran nama untuk mereka. "Saya tidak akan menggunakan pasal karet," ujarnya.

Anggaran siluman yang dimaksudkan Ahok nilainya mencapai Rp 12,1 triliun. Proyeknya adalah pembelian Uninterruptible Power Supply di semua kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. "Programnya tiba-tiba muncul," tuturnya.

Ahok menjelaskan, temuan itu didapat dari APBD yang disusun oleh DPRD setelah rapat paripurna pengesahan berlangsung pada 27 Januari lalu. Saat disahkan, peraturan daerah tentang APBD hanya berupa lembaran tipis dan bukan berupa bundel seperti yang seharusnya.

menirukan tanggapan DPRD ihwal peraturan daerah itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah kabar adanya dana siluman yang ditudingkan seterusnya itu. "Buktikan saja," katanya. Menurut dia, Ahok tengah panik menghadapi angket yang digelar hari ini. Dia juga mengatakan, kalau seluruh anggota Dewan setuju, bukan tak mungkin Ahok bisa diturunkan dari jabatannya. "Satu-satunya cara supaya Ahok selamat, ya mundur saja."

● PRAGA UTAMA | LINDA HAIRANI | ERWAN HERMAWAN

Angket dari Kebon Sirih

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akhirnya menggelar sidang paripurna hak angket hari ini. Politikus Kebon Sirih memilih jalur tersebut ketimbang hak interpelasi. Sebab, jalur ini dinilai lebih cepat untuk menggulingkan kursi Ahok. "Kenapa hak angket, karena kesalahan Ahok sudah jelas. Aturan ditabrak itu pidana," kata anggota fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman.

Hak Angket

Dasar hukum:

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
- Tata tertib DPRD DKI

Syarat:

- Usul minimal dua fraksi atau 15 anggota Dewan

Tujuan: Menyelidiki program pemerintah yang dianggap menyimpang dari aturan. Ahok dituding melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah anggota DPRD: 108

Jumlah Fraksi: 9 (PDIP, PPP, Gerindra, PKS, PAN-Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, dan PKB)

Belum menentukan sikap: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Inisiator Angket: M. Taufik (Gerindra), Anggota Badan Anggaran Dewan, dan pimpinan lain selain Prasetyo Edi Marsudi.

● ERWAN HERMAWAN | PRAGA UTAMA